

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii	
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v	
ABSTRAK	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Definisi Operasional	8
	F. Metode Penelitian	10
	G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
	A. Sejarah Dan Kelembagaan KPK	15
	1. Sejarah KPK	15
	2. Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi	18
	B. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban KPK	21
	1. Kewenangan KPK	23
	2. Kewajiban KPK	27
	3. Struktur Organisasi KPK	28
	C. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi	30
	D. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	34

BAB III	PRAPERADILAN	
	A. Hukum Acara Pidana	37
	B. Praperadilan Menurut KUHAP	47
	1. Ciri Dan Eksistensi Praperadilan	48
	2. Tujuan Dan Kewenangan Praperadilan	49
	3. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan ..	51
	4. Yang Berwenang Memeriksa Praperadilan	55
	5. Proses Dan Tata Cara Pemeriksaan Pra-Peradilan	56
	6. Gugur Pemeriksaan Praperadilan	58
	7. Upaya Hukum Penetapan Pra Peradilan	60
	C. Perbandingan Praperadilan Dengan Hakim Komisaris di Belanda	62
	D. Perluasan Objek Praperadilan	64
	1. Objek Praperadilan Menurut KUHAP	64
	2. Perluasan Ruang Lingkup Pra-Peradilan	66
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Penetapan Tersangka Menjadi Objek Praperadilan	76
	1. Tidak Sesuai Dengan Asas Legalitas	77
	2. Terjadi Kekosongan Hukum Akibat Perluasan Objek Praperadilan	79
	3. Ketidaktercemerlangan Dalam Memeriksa Bukti Permulaan Dalam Waktu Yang Singkat	84
	B. Analisa Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel.	
	1. Kasus Posisi	88
	a. Identitas Pemohon	88
	b. Identitas Termohon	89

2.	Deskripsi Kasus	90
a.	Tentang Duduk Perkara	92
b.	Pertimbangan Hakim	97
c.	Amar Putusan	100
C.	Mekanisme Penetapan Tersangka Oleh KPK, Dalam Kasus Praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.Sel. atas nama Setya Novanto	101
1.	Kewenangan KPK Dalam Menetapkan Tersangka	101
2.	Bukti Permulaan dan Tindak Pidana Penyertaan	110
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN - LAMPIRAN		